

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2012**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan INPRES No 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) No 239/ IX/ 6/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun penyusunan LAKIP ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategy (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Instansi Pemerintah yang dalam hal ini adalah Rencana Strategy dan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya penyusunan LAKIP ini diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD 2011-2015 dan Renja SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/ kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Akhirnya semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2012

Pt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. GUNADI, S.Sos.MSi

Pembina
NIP. 19650403 198603 1 030



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Analisis Perkembangan Strategik	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Stratejik	13
1 Visi	13
2 Misi	13
3 Tujuan	14
4 Sasaran	14
B. Rencana Kinerja	15
1 Sasaran dan Indikator Sasaran	15
2 Program	15
3 Kegiatan dan Indikator Kegiatan	16
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Evaluasi Kinerja	18
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja	20
D. Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Rencana Strategis	
Rencana Kinerja Tahunan	
Penetapan Kinerja	
Pengukuran Kinerja	



IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan menentukan sasaran-sasaran yang terukur, terpadu dan sistematis setiap tahun anggaran.

Dalam mengimplementasikan RENSTRA tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2011 telah menetapkan 4 (empat) tujuan, 4 (empat) kebijakan, 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan didukung dengan biaya sebesar Rp. 13.254.630.700.00 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 11.835.347.300.00, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.277.492.000.00 dan Belanja Langsung Rp. 2.557.855.300.00, dan APBN sebesar Rp. 1.419.283.400.00.

Selanjutnya pada akhir Tahun Anggaran 2011 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011. Dalam hubungan ini pengukurannya didasarkan pada keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dengan menyajikan prosentase tingkat pencapaian kinerja dan pencapaian sasaran, sekaligus menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Dari penetapan sebagaimana alinia 3 (tiga) ikhtisar ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 telah mencapai skala ordinal 85 – 100 yang berpredikat **sangat baik/ berhasil**, pengukuran prosentase pencapaian indikator kinerja dengan prosentase pencapaian rencana tingkat pencapaian (target) sebesar 100%, sedangkan capaian anggaran dari nilai total sebesar Rp. 11.835.347.300.00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.774.874.228.00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 60.473.072.00 (99,49%), adapun sisa anggaran dimaksud kembali ke Kas Daerah.



Meski dengan hasil capaian tersebut, tentu masih terdapat kendala-kendal, yakni :

- a. Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan
- b. Masih Dijumpai Tingkat Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- c. Banyaknya Peraturan Perundang Undangan Yang Bias Gender
- d. Masih Rendahnya Upaya Untuk Memberdayakan Keluarga Guna Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas
- e. Kurangnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- f. Masih Tingginya Keluarga-Keluarga Yang Belum Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Secara Minimum
- g. Masih Rendahnya Ketahanan dan Kualitas Lingkungan Keluarga
- h. Masih Tingginya Unmetneed
- i. Cakupan PIK – REMAJA Cukup Tinggi.
- j. Masih Belum Meratanya Keluarga Balita yang ikut BKB.
- k. Masih Rendahnya Keluarga Remaja yang ikut BKR.

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para pelaksana. Secara operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi Jaringan Kerja Perempuan dan masyarakat terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA).
2. Melaksanakan Sosialisasi berbagai produk hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Mengoptimisasikan pelaksanaan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender.
4. Pengembangan dan pengoptimalisasian Peran Kader POSYANDU.
5. Peningkatan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking.
6. Penambahan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
7. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
8. Meningkatkan kinerja pengelola Program BKB untuk mengembangkan model BKB yang terpadu dengan kegiatan sektor lain serta untuk mendukung kesinambungan kegiatan BKB.



9. Meningkatkan advokasi untuk meningkatkan dukungan anggaran kegiatan dalam rangka meningkatkan jumlah dan kompetensi kader BKB.
10. Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan dana dan sarana kegiatan serta pemanfaatan system informasi yang ada.

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi nasional maupun global, maka langkah-langkah antisipatif kedepan yang perlu diambil oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan antara lain :

1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non formal.
2. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sebagai bentuk upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Government*) yaitu dari *sentralisasi* menjadi *desentralisasi*, tentunya membawa pengaruh perubahan yang cukup signifikan di daerah. Terlebih pada penataan kelembagaan dan organisasi yang berada di ruang lingkup dan kewenangan daerah.

Salah satunya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan otonomi daerah Kabupaten dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang kian hari semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, telah membawa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang *starting poin* pada arah dan kebijakan bagi pemberdayaan keluarga melalui penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 serta penghapusan KDRT berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan perlindungan anak berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan mensikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi gap (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan. Indikasi kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 51 Tahun 2008 : tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 71 Tahun 2008 tentang UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi terdiri atas :

1. Kepala Badan sebagai unsur Pimpinan.
2. Sekretariat sebagai unsur Staf, yang terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Pertengkapan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Keluarga Berencana sebagai unsur Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Analisa.
 - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

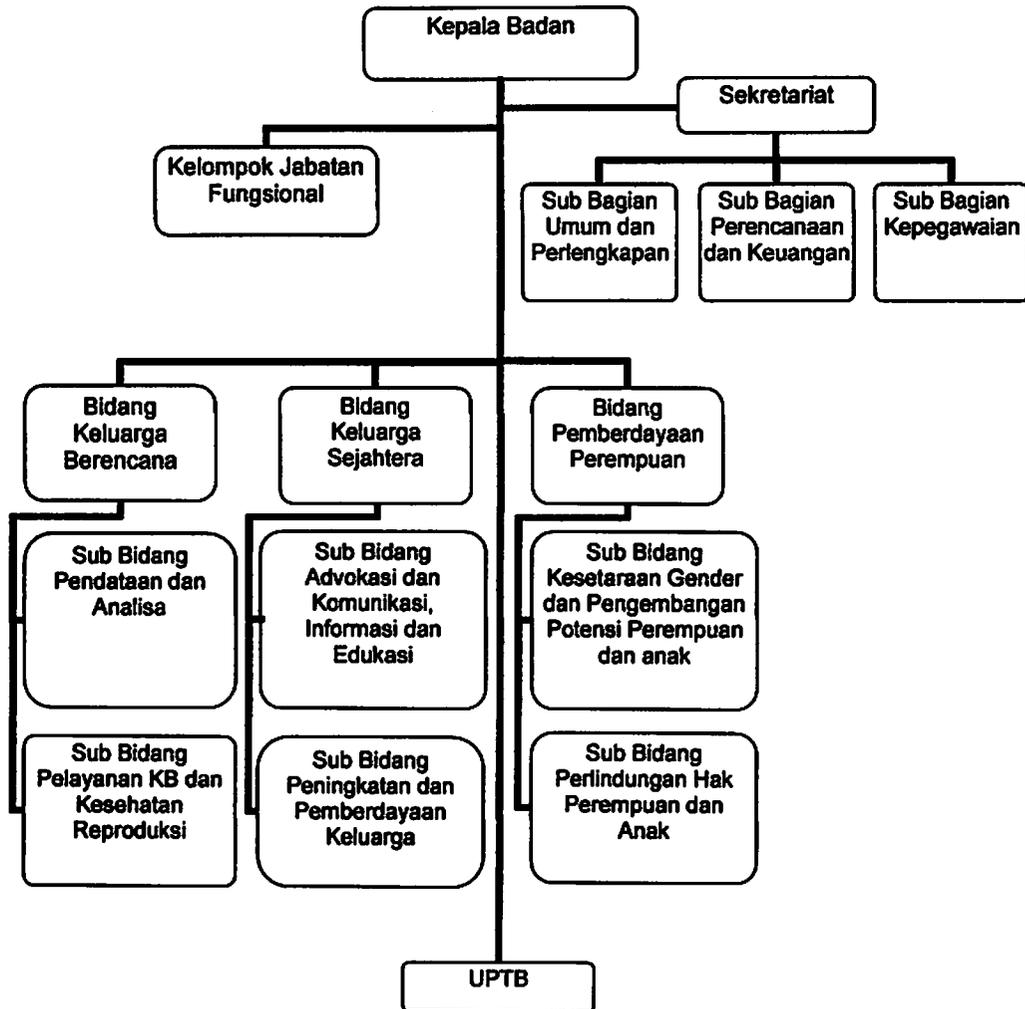


4. **Bidang Keluarga Sejahtera sebagai unsur Pelaksana, yang terdiri atas :**
 - a. **Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.**
 - b. **Sub Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga.**
5. **Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai unsur Pelaksana, yang terdiri atas :**
 - a. **Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Pengembangan Potensi Perempuan dan Anak**
 - b. **Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.**
6. **Unit Pelaksana Teknis Badan.**
7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Dari keterangan tersebut diatas maka dapat disusun bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**



Sumber : Lampiran VI Peraturan Daerah kabupaten Lamongan No. 4 Tahun 2008

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan didukung oleh 191 orang personal yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SMA sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana tabel I sebagai berikut.



Tabel I
Personil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Tahun 2011

NO	JABATAN STRUKTURAL	JMLH	PANGKAT/ GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN FORMAL	JMLH	KET.
1.	Kepala Badan	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S.2	1	
2.	Sekretaris	1	Pembina (IV/ a)	1	S.2	1	
3.	Kepala Bidang	3	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	2	
			Pembina (IV/a)	2	S.2	1	
4.	Kasubag	3	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S.1	1	
			Penata (III/c)	1	S.1	1	
5.	Kasubid	5	Pembina (IV/a)	2	S.2	2	
			Penata Tk. I (III/d)	2	S.2	1	
					S.1	1	
			Penata (III/c)	1	S.1	1	
6.	Kepala UPT	20	Pembina (IV/a)	11	S.2	10	
					S.1	1	
			Penata Tk. I (III/d)	8	S.2	2	
					S.1	6	
			Penata (III/c)	1	SMA	1	
7.	Staf	44	Penata Tk. I (III/d)	6	S.1	6	
			Penata (III/c)	6	S.1	5	
					D.2	1	
			Penata Muda Tk I (III/b)	15	S.2	1	
					S.1	3	
					D.2	1	
					SMA	10	
			Penata Muda (III/a)	2	S.1	2	
			Pengatur Tk. I (II/d)	3	SMA	3	
			Pengatur (II/c)	3	SMA	3	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	7	SMA	7	
			Pengatur Muda (II/a)	2	SMA	2	
	Sub Jumlah	77		77		77	
NO	JABATAN FUNGSIONAL	JMLH	PANGKAT/ GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN FORMAL	JMLH	KET.
1	Penyuluh KB	114	Pembina (IV/a)	34	S.2	4	
					S.1	30	
			Penata Tk. I (III/d)	44	S.2	1	
					S.1	35	
					D.3	1	
					SMA	7	
			Penata (III/c)	26	S.1	11	
					D.3	2	
					SMA	13	
			Penata Muda Tk I (III/b)	4	S.1	1	
					SMA	3	
			Penata Muda (III/a)	5	S.1	4	
					SMA	1	
			Pengatur (II/c)	1	SMA	1	
	Sub Jumlah	114		114		114	
	JUMLAH TOTAL	191		191		191	



Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II, berikut ini :

Tabel II
Data Sarana dan Prasarana
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Tahun 2011

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Roda 4 (empat)	Buah	7	Setelah penghapusan
2.	Roda 2 (dua)	Buah	170	
3.	Komputer	Unit	20	
4.	Mesin Ketik	Buah	24	
5.	AC	Buah	6	
6.	O H P	Unit	1	
7.	Kipas Angin	Buah	30	
8.	TV	Buah	2	
9.	Laptop	Buah	35	
10.	Layar	Buah	1	
11.	L C D	Buah	1	
12.	H T	Unit	21	
13.	Printer	Buah	48	
14.	PA/Wireless	Buah	33	
15.	Meubelair			
	- Meja Tulis	Buah	146	
	- Meja Tamu	Set	11	
	- Meja Rapat	Buah	17	
	- Kursi Kayu	Buah	92	
	- Kursi Besi	Buah	58	
	- Kursi Plastik	Buah	168	
	- Almari Kayu	Buah	23	
	- Almari Arsip	Buah	26	
	- Kursi Kerja Eselon	Buah	37	
	- Jam Dinding	Buah	40	
	- Mesin Hitung	Buah	10	
	- Meja kerja staf	Buah	20	
	- Kursi kerja Staf	Buah	35	
	- Kursi Rapat	Buah	24	
	- Rak Buku	Buah	3	
	- Kursi Kerja	Buah	3	
	- Exhousfan	Buah	6	
	- Papan Nama	Buah	8	
	- White Board	Buah	69	

**Pembiayaan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan didukung dengan dana sebesar Rp. 13.254.630.700.00 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 11.835.347.300.00 sebagaimana tabel III dan dana APBN sebesar Rp. 1.419.283.400.00, sebagaimana tabel III DAN IV, berikut ini :

Tabel III
Data Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Sumber Dana dari APBD Tahun 2011

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.277.492.000.00	9.228.214.024.00
	Belanja Pegawai	9.277.492.000.00	9.228.214.024.00
2.	BELANJA LANGSUNG	2.557.855.300.00	2.546.660.204.00
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.336.708.350.00	1.328.127.254.00
	Program Pelayanan Administrasi	306.110.700.00	302.840.641.00
	Perkantoran		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.900.000,00	34.779.941,00
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.900.000,00	9.900.000,00
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.943.200,00	59.943.200,00
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.500.000,00	43.500.000,00
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00
	12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	19.467.500,00	19.317.500,00
	14. Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tempat	7.500.000,00	7.500.000,00
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	547.497.650.00	546.045.150.00
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27.125.000,00	27.100.000,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	27.875.000,00	27.875.000,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	18.000.000,00	17.999.000,00



4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40.000,000.00	40.000,000.00
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	419,497,650.00	418.071.150.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	408.100,000.00	404.241.463.00
1.	Pengadaan Pakaian kerja Lapangan (DAK)	408.100,000.00	404.241.463.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000.00	15,000,000.00
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15,000,000.00	15,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15,000,000.00	15,000,000.00
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5,000,000.00	5,000,000.00
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	45,000,000.00	45,000,000.00
1.	Advokasi Dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	20,000,000.00	20,000,000.00
2.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	10,000,000.00	10,000,000.00
3.	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan	15.000.000,00	15.000.000,00
	KELUARGA BERENCANA	1.221.146.950.00	1.218.632.950.00
	Program Keluarga Berencana	382.599.950.00	380.786.950.00
1.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin (DAK)	342.599.950.00	340.786.950.00
2.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	10,000,000.00	10,000,000.00
3.	Pembinaan Keluarga Berencana	15,000,000.00	15,000,000.00
4.	Revitalisasi Program KB Dan Kesejahteraan Sosial Serta Pelaporan Dan Evaluasi Program KB dan Kesos	15,000,000.00	15,000,000.00



1	2	3	4
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	10,000,000.00	10,000,000.00
	1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	10,000,000.00	10,000,000.00
	Program Pelayanan Kontrasepsi	92,750,000.00	92.600.000.00
	1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	27,750,000.00	27,750,000.00
	2. Pengadaan Alat Kontrasepsi	50,000,000.00	49.850.000.00
	3. Pelayanan KB Medis Operasi	15,000,000.00	15,000,000.00
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	235,000,000.00	235,000,000.00
	1. Peningkatan Jaringan Kerja Mitra Kerja	15.000.000.00	15.000.000.00
	2. Penilaian IMP dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan	10.000.000.00	10.000.000.00
	3. Peningkatan kinerja institusi masyarakat pedesaan	210,000,000.00	210,000,000.00
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	285,670,000.00	285,670,000.00
	1. Penyediaan sarana dan prasarana Pusat pelayanan informasi konseling KRR (DAK)	285,670,000.00	285,670,000.00
	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	215,127,000.00	215,127,000.00
	1. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)	215,127,000.00	215,127,000.00
	JUMLAH	11.835.347.300.00	11.774.874.228.00



Tabel IV
Data Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Sumber Dana dari APBN Tahun 2011

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI
1.	PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB	1.419.283.400.00	1.419.283.400.00
1.1	Kegiatan Kesertaan Ber KB (3331.02)	484.350.000.00	484.350.000.00
	Pengembangan dan Peningkatan		
	Pembinaan KB dan Kesehatan		
	1. Kontrasepsi Mantab dan Ayoman	477.850.000.00	477.850.000.00
	2. Operasional Penggerakan Kesertaan Ber KB Pria	1.000.000.00	1.000.000.00
	3. Operasional Peningkatan KB Perusahaan di Kab Lamongan	1.000.000.00	1.000.000.00
	4. Tim KB Keliling (TKBK) Kab Lamongan.	4.500.00.00	4.500.00.00
1.2	Kegiatan KKB yang Melayani Sesuai dengan SOP (3331.03)	118.100.000.00	118.100.000.00
	Klinik KB yang Melayani KB dan KR	118.100.000.00	118.100.000.00
	1. R/R Klinik	36.300.000.00	36.300.000.00
	2. Operasional Pembinaan Petugas Penghubung R/R Klinik	28.800.000.00	28.800.000.00
	3. Pertemuan Medis Teknis Tk. Kab Lamongan	5.000.000.00	5.000.000.00
	4. Penggerakan Klinik Melalui Petugas Lapangan	48.000.000.00	48.000.000.00
1.3	Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga (3331.04)	166.600.000.00	166.600.000.00
	Penyiapan Kehidupan Keluarga Bagi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi	166.600.000.00	166.600.000.00
	1. Pembinaan Keluarga Bina-Bina	13.500.000.00	13.500.000.00
	2. Pengelolaan Data Basis Online Bina Ketahanan	2.400.000.00	2.400.000.00
	3. Operasional Bina Keluarga Balita	40.500.000.00	40.500.000.00
	4. Pembentukan dan Pengembangan Pik Remaja/Mahasiswa	2.000.000.00	2.000.000.00
	5. Orientasi Pendidik/Konselor Sebaya	23.000.000.00	23.000.000.00
	6. Pertemuan Perkembangan UPPKS Tk Kabupaten Lamongan	2.000.000.00	2.000.000.00
	7. Pendampingan Kelompok UPPKS	2.700.000.00	2.700.000.00
	8. Operasional Bina Keluarga Remaja dan Lansia	8.100.000.00	8.100.000.00
	9. Operasional PIK KRR	28.200.000.00	28.200.000.00
	10. Orientasi Tribina dan Kelompok UPPKS	44.200.000.00	44.200.000.00
1.4	Kegiatan Advokasi dan Penggerakan (3331.05)	35.000.000.00	35.000.000.00
	Peningkatan Promosi dan Penggerakan Pembangunan Kependudukan dan KB	35.000.000.00	35.000.000.00
	1. Pembuatan/Pengadaan Billboard	35.000.000.00	35.000.000.00



1	2	3	4
1.5	Kegiatan Kerjasama dengan Mitra Kerja (3331.06)	6.500.000.00	6.500.000.00
	Penguatan Jejaring Kemitraan	6.500.000.00	6.500.000.00
	1. Operasional Baksos dengan Mitra Tk Kabupaten	5.000.000.00	5.000.000.00
	2. Penguatan Tim Asistensi Jejaring Kemitraan	500.000.00	500.000.00
	3. Fasilitasi Kabupaten dalam Program KB	1.000.000.00	1.000.000.00
1.6	Kegiatan Pengelolaan Data dan Inf Pembangunan KKB (3331.07)	168.400.000.00	168.400.000.00
	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan dan Kel (SIDUGA) Berbasis TIK	168.400.000.00	168.400.000.00
	1. Operasional Pendataan Keluarga	165.900.000.00	165.900.000.00
	2. Sarasehan Hasil Pendataan Tk Kabupaten	2.500.000.00	2.500.000.00
1.7	Kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih (3331.08)	367.983.400.00	367.983.400.00
	Peningkatan Kualitas Manajemen Program Kependudukan dan KB	367.983.400.00	367.983.400.00
	1. Pelatihan RR Bagi Petugas Klinik di Kabupaten	25.350.000.00	25.350.000.00
	2. Pelatihan Teknis IUD/Implant Bagi Bidan di Kabupaten	235.525.000.00	235.525.000.00
	3. Pelatihan PIK KRR Tahap Tumbuh	6.870.000.00	6.870.000.00
	4. Orientasi KKB Bagi Toga/Toma	6.000.000.00	6.000.000.00
	5. Orientasi Jambore Kader KKB Tk Prop	58.800.000.00	58.800.000.00
	6. Penyusunan Laporan program dan Kegiatan Tk Propinsi	35.438.400.00	35.438.400.00
1.8	Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan dan Monev (3331.10,12)	74.000.000.00	74.000.000.00
	Dukungan Manajemen (3331.10)	26.600.000.00	26.600.000.00
	Peningkatan Kualitas Manajemen Program Kependidikan dan KB	26.600.000.00	26.600.000.00
	1. Pengumpulan Data Basis Perencanaan Tk Kabupaten	2.000.000.00	2.000.000.00
	2. Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan Sarana dan Prasarana Pelayanan	21.600.000.00	21.600.000.00
	3. Stock Opname Alkon	3.000.000.00	3.000.000.00
	Kegiatan Pembinaan dan Monev (3331.12)	47.400.000.00	47.400.000.00
	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pembangunan Kependudukan	47.400.000.00	47.400.000.00
	1. Rapat Kerja Daerah Prog KKB Tk Kabuapten dan Kecamatan	37.000.000.00	37.000.000.00
	2. Pembinaan Teknis Program dan Anggran Program KKB	5.400.000.00	5.400.000.00
	3. Operasional KIE KKB MLL Mupen	5.000.000.00	5.000.000.00
	JUMLAH	1.419.283.400.00	1.419.283.400.00



C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh seseorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mengemban amanah yang cukup strategik bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pendewasaan usia perkawinan dan pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan sumber daya manusia sejak usia dini dengan fokus kegiatan bina keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga (UPPKS) serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

Salah satu dari rencana strategik yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Untuk Perempuan dan Anak, yang mempunyai sasaran terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan, sektor industri dan lembaga non formal. Dan akan tercapainya meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di segala sektor.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menyusun rencana stratejik untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD 2011 – 2015 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang diemban Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

1. VISI

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“MENUJU KELUARGA KECIL YANG SEJAHTERA DAN BERKUALITAS“

Visi tersebut menggambarkan suatu niat baik dan ketulusan melalui semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera atas anugerah yang diberikan Allah SWT, berupa keanekaragaman sumberdaya yang ditunjang dengan kualitas pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan berkembangnya perekonomian masyarakat.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi-Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Ekonomi.



2. Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Dalam Rangka Membangun Keluarga Kecil Berkualitas.
4. Mengembangkan Kemitraan dan Potensi Sumberdaya Lokal Melalui Pemberdayaan Keluarga.

3. TUJUAN

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mampu mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Untuk Perempuandan Anak.
- b. Meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi dan mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas
- d. Meningkatkan Kemitraan dan Potensi Sumberdaya Lokal Untuk Kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

4. SASARAN

Sasaran adalah merupakan rangkaian capaian perencanaan strategik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan Rencana Strategik (RENSTRA).

Adapun sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan, sektor industri dan lembaga non formal.
- b. Peningkatan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS dan perencanaan perkawinan.



- c. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga miskin, keluarga berpendidikan rendah dan terpencil.
- d. Terwujudnya peningkatan ketahanan keluarga dalam usahan ekonomi produktif , ketrampilan dan pengetahuan usaha, serta fasilitas dalam mengakses sumber modal

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2011-2015) dan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, mempunyai program dan kegiatan sebagaimana pada Lampiran Rencana Stratejik (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

- Sasaran : Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan, sektor industri dan lembaga non formal. Indikator sasaran : Peningkatan kualitas kader dan pendidikan anak.
- Sasaran : Peningkatan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS dan perencanaan perkawinan. Indikator sasaran : Peningkatan jumlah peserta KB Aktif.
- Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan tentang Keluarga berencana. Indikator sasaran : Terwujudnya peningkatan kesehatan reproduksi akseptor KB bagi keluarga miskin.
- Sasaran : Terwujudnya peningkatan ketahanan keluarga dalam usahan ekonomi produktif , ketrampilan dan pengetahuan usaha, serta fasilitas dalam mengakses sumber modal Indikator sasaran : Peningkatan pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

2. Program

- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan



- Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- Program Keluarga Berencana
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- Program Pelayanan Kontrasepsi
- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
- Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsulting KRR
- Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

- Peningkatan kualitas kader dan pendidikan anak
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan untuk perempuan
- Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan
- Pelaksanaan Worksop bagi pimpinan LSOM/LSM
- Cakupan Peserta Aktif KB
- Peningkatan pemahaman remaja mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja
- Cakupan Peserta Aktif KB
- Peningkatan pembinaan peranserta masy dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- Pengembangan sarana dan prasarana Pusat Informasi dan konsultasi KRR
- Peningkatan bahan informasi dan kinerja institusi masyarakat Pedesaan dalam Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- Cakupan Peserta Aktif KB



C.PERJANJIAN KINERJA

1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Ekonomi, Bertujuan untuk Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan, sektor industri dan lembaga non formal.
2. Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, bertujuan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak reproduksi dan kesehatan reproduksi beserta berbagai permasalahannya.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Dalam Rangka Membangun Keluarga Kecil Berkualitas, bertujuan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Individu.
4. Mengembangkan Kemitraan dan Potensi Sumberdaya Lokal Melalui Pemberdayaan Keluarga, bertujuan untuk Menjalin dan meningkatkan dukungan mitra kerja dan mengembangkan potensi sumber kesejahteraan dalam upaya kemandirian dan ketahanan keluarga.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, digunakan instrumen pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 – 100	= Sangat Baik / Sangat berhasil
70 - < 85	= Baik / berhasil
55 - < 70	= Kurang Baik / kurang berhasil
< 55	= Sangat Kurang Baik / tidak berhasil

B. EVALUASI KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun dimulai tahun 2011 – 2015, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menetapkan hal dimaksud pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2015. Selanjutnya untuk mewujudkan capaian kinerja selama 1 tahun yakni pada tahun 2011 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mengambil langkah, yakni berupa kebijakan, program dan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, dengan sistem berikut :

Evaluasi program saat ini sampai dengan bulan Desember tahun 2011 berbagai program Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mengacu pada PPM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Keluarga Berencana:
 - a. Jumlah peserta KB baru dengan menggunakan semua metode sampai dengan bulan desember 2010 telah mencapai 44.172 atau (118,69%) dari jumlah PPM PB-SM 37.215
 - b. Jumlah peserta KB baru wanita sampai dengan bulan Desember tahun 2011 telah mencapai sebesar 42.495 Atau (119,49%) dari jumlah PPM PB wanita sebesar 35.565
 - c. Jumlah peserta KB baru Pria (MOP dan Kondom) sampai dengan bulan desember 2011 sebesar 1.677 atau (101,64%) dari jumlah PPM pria 1.650.



- d. Jumlah peserta KB baru MKJP samapai dengan bulan desember 2011 telah mencapai sebesar 10.713 atau (162,45%) dari jumlah PPM PB MKJP sebesar 6.595.
- e. Pusat informasi dan konseling KRR sampai dengan bulan desember 2011 sebesar 50 PIK atau 102,04% terhadap PPM sebesar 49 Dengan rician sebagai berikut :
 - Tumbuh telah mencapai 39 PIK atau 102,63% terhadap PPM sebesar 38 PIK.
 - Tegak telah mencapai 7 PIK atau 100% terhadap PPM sebesar 7 PIK.
 - Tegar telah mencapai 4 PIK atau 100% terhadap PPM sebesar 4 PIK.

2. Bidang Keluarga Sejahtera

- a. Jumlah Keluarga yang memiliki balita aktif KB saat ini telah mencapai 31.380 keluarga atau 80,84% terhadap PPM sebesar 38.820.
- b. Jumlah keluarga yang memiliki remaja aktif BKR saat ini telah mencapai 5.853 keluarga atau 103,63% terhadap PPM sebesar 5.648
- c. Jumlah kelompok UPPKS yang terdaftar pada data base on line UUPKS saat ini 554 Atau 99,81% terhadap PPM sebesar 555.
- d. Jumlah kelompok UPPKS yang dapat akses modal saat ini sebanyak 0 atau 0,000% terhadap PPM sebesar 0.
- e. Prosentase (%) PUS Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I anggota UPPKS Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I yang menjadi peserta KB saat ini telah mencapai 109.20% dan 107,91 % terhadap PPM sebesar 108,60%.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- a. Jumlah partisipasi perempuan terhadap angkatan kerja perempuan telah mencapai 249.543 atau 5,85% dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 490.743.
- b. Jumlah perempuan yang berperan dibidang usaha ekonomi produktif telah mencapai 28.194 atau 4,30% dari jumlah perempuan sebesar 655.056.
- c. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah telah mencapai 5.428 atau 41,26% dari jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Lamongan sebanyak 13.155.
- d. Jumlah angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atastelah mencapai 99,10% dari jumlah perempuan sebesar 655.056.



- e. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini telah mencapai 21 kasus.

C. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun Analisa Pencapaian Kinerja didasarkan pada kinerja SKPD bersangkutan, atas dasar menilai keberhasilan dan kegagalan setiap pelaksanaan kegiatan yang ditentukan, yakni sebanyak 4 (empat) tujuan, 4 (empat) kebijakan, 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan sebagaimana Lampiran RKT Tahun 2011.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dipergunakan untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai	9.277.492.000.00	9.228.214.024.00	99,47%
2.	BELANJA LANGSUNG			
	- Sarana Aparatur - Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Untuk Perempuan dan Anak.	1.336.708.350.00	1.328.127.254.00	99,36%
	Meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif	382.599.950.00	380.786.950,00	99.53%
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi dan mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas	102.750.000.00	102.600.000.00	99.85%
	Meningkatkan Kemitraan dan Potensi Sumberdaya Lokal Untuk Kemandirian dan Ketahanan Keluarga	735.797.000.00	735.146.000.00	99,91%
	Jumlah	11.835.347.300.00	11.774.874.228.00	99,49%



Dari tabel diatas terdapat 4 (empat) Sasaran dengan dana APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar nilai total sebesar Rp. 11.835.347.300.00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.774.874.228.00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 60.473.072.00, selanjutnya sisa dana Tahun Anggaran 2011 tersebut dikembalikan ke Kas Daerah. Kemudian untuk capaian Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebesar 99,49%.



BAB IV PENUTUP

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD maupun APBN Tahun 2011, baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan berupa kegiatan-kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Tahun 2011 dikategorikan sangat berhasil (100 %). Hal ini diketahui dari penghitungan dengan pengukuran skala ordinal (skala 85 – 100 = Sangat Baik/ Berhasil). Pencapaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan telah dapat mendukung atau mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 2011 – 2015. Ini artinya kebijakan dan program yang dikerjakan bersinergi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD maupun APBN, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Kesejahteraan Kabupaten Lamongan.

Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya.

Lamongan, Januari 2012

Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. GUNADI, S.Sos.MSi
Pembina
NIP. 19650403 198603 1 030



PENYUSUN LAKIP

**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**

1. Nama : ROVI ANDRI WINARNO, S.Sos
2. NIP : 19810831 200604 1 015
3. Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I / III b
4. Jabatan : Staf
5. Alamat :
 - Kantor : Jl. Veteran No. 37 Lamongan
 - Rumah : Desa Menongo, Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
6. Nomor Telp / Hp : 081 334 684 398
 - Kantor : (0322) 321182
 - Rumah : -

Lamongan, Januari 2012

ROVI ANDRI WINARNO, S.Sos
Penata Muda Tk.I
NIP. 19810831 200604 1 015